

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Krisis moneter yang melanda di kawasan Asia khususnya Indonesia, memiliki dampak yang begitu besar terhadap kondisi perekonomian. Dampak yang terlihat secara jelas adalah terjadinya penurunan nilai kurs mata uang. Setahun setelah terjadinya krisis Juli 1998 besaran ekonomi tersebut menyebabkan nilai mata uang rupiah menurun 83,2%, indek saham terpangkas 35%, kapitalisasi pasar berkurang 88%, tingkat pengangguran meningkat menjadi 16,8% suku bunga meningkat menjadi 65% dan nilai impor menurun menjadi 33,4% (Kompas 23 Juli 1998 dan Asiaweek 17 Juli 1998).

Kondisi perekonomian yang sulit ini berimbas pada ketidakpastian dunia usaha, khususnya dunia usaha perbankan. Pada tahap awal krisis ekonomi melanda, terjadi penarikan modal secara besar-besaran oleh investor untuk dialihkan keluar Indonesia. Keadaan seperti ini tentu saja membuat dunia usaha semakin lesu karena kekurangan modal. Akibatnya, banyak perusahaan yang terpaksa memperkecil usahanya untuk dapat tetap bertahan atau bahkan ada pula yang terpaksa harus kolaps. Hampir seluruh perusahaan yang ada di Indonesia mengalami kesulitan keuangan.

Salah satu dampak dari krisis moneter adalah *kolapsnya* sejumlah bank karena tidak mampu mempertahankan *going concernnya*. Bank-bank tersebut kemudian dilikuidasi oleh pemerintah. Ketidakmampuan atau kegagalan dari

bank-bank tersebut dapat disebabkan oleh dua hal, *pertama*, kegagalan ekonomi. *Kedua*, kegagalan keuangan. Kegagalan ekonomi berkaitan dengan ketidakseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran. Selain itu, kegagalan ekonomi juga bisa disebabkan oleh biaya modal perusahaan yang lebih besar dari tingkat laba atas biaya historis investasi.

Pada Nopember 1997, banyak bank baik swasta maupun persero BUMN mulai terganggu likuiditasnya yang pada akhirnya terdapat 16 bank yang dilikuidasi dan yang masih tak sehat sekitar 40-an. Bank yang tak sehat tersebut antara lain dikarenakan kredit macet, CAR di bawah 5% dan telah mengambil KLBI 200%-500%.

Perusahaan dikatakan gagal keuangannya jika perusahaan tersebut tidak mampu membayar kewajibannya pada waktu jatuh tempo meskipun total aktiva melebihi total kewajibannya. Jatuh banggunya perusahaan merupakan hal yang biasa. Pertanyaannya apakah kebangkrutan itu tidak bisa diramalkan sebelumnya? Apakah kita tidak bisa memanfaatkan informasi laporan keuangan dalam menguji sehat atau tidaknya usaha bisnis.

Kondisi yang membuat para investor dan kreditor merasa khawatir jika perusahaan mengalami kesulitan keuangan (*financial distress*) yang bisa mengarah kebangkrutan. Tingkat kekhawatiran investor ini makin bertambah dengan munculnya peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 tahun 1998 yang mengatur kepailitan. Menurut perpu No. 1, debitur yang terkena *default* (gagal bayar) dapat dipetisikan bangkrut oleh 2 kreditor saja.

Resiko likuidasi sebuah bank sebenarnya dapat dilihat dan diukur melalui laporan keuangan, dengan cara melakukan analisis terhadap laporan keuangan yang dikeluarkan oleh bank yang bersangkutan. Analisis laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan serta hasil-hasil yang telah dicapai sehubungan dengan pemilihan strategi perusahaan yang telah dilaksanakan.

Penilaian kinerja perusahaan penting dilakukan baik oleh manajemen, pemegang saham, pemerintah maupun oleh *stockholder* yang lain. Dari laporan keuangan perusahaan dapat diperoleh informasi tentang posisi keuangan, kinerja perusahaan, aliran kas perusahaan, dan informasi lain yang berkaitan dengan laporan keuangan. Oleh karena itu, analisis laporan keuangan sangat dibutuhkan untuk memahami informasi laporan keuangan [Gibson & Boyer 1980, Gibson 1982, dan Lev & Thiagaraja 1993]. Analisis laporan keuangan tersebut meliputi perhitungan dan interpretasi rasio keuangan. Dalam melakukan analisis laporan keuangan terhadap berbagai alat dan teknik yang dapat digunakan. Alat yang paling umum digunakan adalah analisis rasio keuangan.

Peramalan akan kondisi perusahaan di masa depan sangat penting bagi investor dan bagian manajemen. Karena kebangkrutan berarti menyangkut terjadinya biaya-biaya baik biaya langsung maupun tidak langsung untuk mengatasinya. Biaya langsung terdiri dari biaya konsultan seperti akuntan, penasihat hukum dan biaya tidak langsung berupa hilangnya kesempatan untuk menghasilkan laba. Keduanya merupakan faktor ekstern yang

menyebabkan terkurasnya aktiva dan sumber-sumber keuangan yang dimiliki perusahaan. Oleh karena itu akan lebih baik apabila gejala dan tanda-tanda kebangkrutan itu diketahui lebih awal sehingga dapat dijadikan solusinya untuk mengurangi atau menghindarkan biaya-biaya. Rasio permodalan (CAR) merupakan salah satu aspek penilaian tingkat kesehatan bank pada periode tertentu yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu CAMEL (*Capital, assets, management, earning and liquidity*) Dari kelima aspek tersebut empat aspek dapat diukur melalui rasio kecukupan modal, rasio cadangan penghapusan kredit terhadap aktiva produktif dan rasio aktiva produktif diklasifikasikan terhadap aktiva produktif, rasio ROA dan efisiensi serta rasio *loan to deposit* dan kewajiban *call money* terhadap aktiva lancar.

Terjadinya likuidasi pada sejumlah bank tentu saja akan menimbulkan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan nasabah, pemilik maupun karyawan yang harus kehilangan pekerjaannya. Hal ini sebenarnya tidak akan menimbulkan masalah yang lebih besar kalau proses likuidasi pada sebuah lembaga perbankan dapat diprediksi lebih dini.

Adanya tindakan untuk memprediksi terjadinya likuidasi tersebut, tentu saja akan dapat menghindari atau mengurangi resiko terjadinya likuidasi tersebut. Secara empiris prediksi kebangkrutan atau likuidasi ini dapat dibuktikan, sebagaimana yang telah dibuktikan oleh beberapa peneliti dengan menggunakan rasio keuangan (Beaver 1966, Dambolena & Khoury 1980, Thomson & Altman 1968).

Studi kebangkrutan perusahaan pertama kali dilakukan oleh Beaver (1966) yang menggunakan 29 rasio keuangan pada lima tahun sebelum terjadi kebangkrutan. Dalam studinya, Beaver membuat enam kelompok rasio keuangan dan membuat *univariate analysis* yaitu menghubungkan tiap-tiap rasio untuk menentukan rasio mana yang paling baik digunakan sebagai prediktor. Rasio keuangan tersebut terdiri dari *cash flows ratios, net income ratios, debt to total assets ratios, liquid assets to current debt ratios, turn over ratios, liquid assets to total assets ratios*. Dari enam kelompok rasio tersebut, beaver menemukan bahwa rasio dari aliran kas terhadap kewajiban total merupakan prediktor yang paling baik untuk menentukan tingkat kebangkrutan perusahaan. Dengan studi ini, Beaver menemukan bahwa rasio keuangan terbukti sangat berguna untuk prediksi kebangkrutan dan dapat digunakan untuk membedakan secara akurat perusahaan yang akan jatuh bangkrut atau tidak.

Studi lain dilakukan oleh Altman (1968) telah menemukan ada lima rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mendeteksi kebangkrutan perusahaan beberapa saat sebelum perusahaan tersebut bangkrut. Kelima rasio tersebut terdiri dari *cash flow to total debt, net income to total assets, total debt to total assets, working capital to total assets dan current ratio*. Altman yang juga menemukan bahwa rasio-rasio tertentu, terutama likuiditas dan leverage, memberikan sumbangan terbesar dalam rangka mendeteksi dan memprediksi kebangkrutan perusahaan.

Pada tahun 1984 Altman melakukan penelitian lagi di sejumlah negara seperti United State, Japan, Jerman, Switzerland, Brazil, Australia, Inggris, Kanada, Belanda dan Perancis (Foster, 1986: 551). Perusahaan yang dijadikan sampel adalah perusahaan yang berada pada industri perbankan. Studi yang dilakukan oleh Altman dan Beaver diatas menunjukkan konsisten bahwa rasio keuangan sangat bermanfaat sebagai indikator dan prediksi kebangkrutan perusahaan. Temuan Altman (1968) tersebut diperkuat oleh hasil eksperimen Beaver (1968). Beaver memberikan ekstensi dari temuan Altman dengan menambah jumlah sampel serta mengkaitkan rasio-rasio keuangan tersebut dengan harga saham. Sampel terdiri dari 79 perusahaan yang sehat dan 79 perusahaan yang bangkrut. Dari kedua kelompok perusahaan tersebut, lima rasio prediktor menunjukkan perbedaan yang signifikan antara perusahaan yang gagal dan perusahaan yang berhasil. Kesimpulan lainnya adalah para investor mengakui dan menyesuaikan posisi *solvency* yang baru dari perusahaan yang mengalami kebangkrutan dan selanjutnya membawa informasi rasio keuangan tersebut kedalam harga saham.

Pasar modal di Indonesia masih diperlukan dan menjadi alternatif penting dalam menyediakan investasi. Secara formal pasar modal dapat didefinisikan sebagai pasar untuk berbagai instrument keuangan (atau sekuritas) jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk hutang ataupun modal sendiri, baik yang diterbitkan pemerintah, *public authorities*, maupun perusahaan swasta. Dengan pengertian yang demikian, maka pasar modal sebagai tempat (arti luas) pertemuan antara penjual dan

pembeli sekuritas yang diterbitkan dan dipasarkan di pasar modal. Penerbit sekuritas yang disebut *emitent* menerbitkan sekuritas baik dalam bentuk penyertaan (saham) maupun penyertaan hutang (obligasi) untuk dijual/dipasarkan di pasar modal yang dapat diperjualbelikan oleh para investor atau pembeli.

Perkembangan pasar modal di Indonesia, yang mulai keberadaannya dengan UU tentang bursa pada tahun 1952 tersebut belum menunjukkan langkah lebih lanjut dan lebih nyata. Pada tahun 1976 pemerintah mengeluarkan Kepres No.52 tahun 1976 tentang Pasar Modal, dan didirikannya BAPEPAM pada tahun 1977 serta PT Danareksa menjadi tonggak langkah nyata dari pemerintah Orde Baru. Perkembangan penataan lebih lanjut tentang pasar modal di Indonesia terus bergulir dengan adanya SK. Menku pada tanggal 23 Desember 1987 (Pakdes I) yang memberikan kekuatan lebih besar bagi pengembangan pasar modal. Kebijakan lanjutannya adalah adanya Pakto 1988, 27 Oktober 1988 dan Pakdes II tanggal 20 Desember 1988.

Sampai saat ini pasar modal di Indonesia telah berkembang dengan pesat. Secara kelembagaan terlihat saat ini infrastruktur pasar modal telah dapat dikatakan sempurna mengingat telah terbentuk berbagai lembaga kelengkapan pasar. Lembaga-lembaga yang telah didirikan misalnya tentang lembaga kliring, penjamin investasi (*underwriter*), manajer investasi (*investormanager*), pialang (*broker*), lembaga penasihat investasi (*investment adviser*), penanggung jawab asuransi (*guanrantor*), lembaga akuntan public

(*public accountant*), lembaga notaris (*notary public*), konsultan hukum (*lowyer = legal adviser*) dan juga lembaga penilai.

Operasionalisasi kegiatan pasar modal akhirnya memperoleh perhatian besar dari pemerintah dengan dikeluarkannya Kepres No. 53/1990 tentang Pasar Modal dan Kepmenkeu No. 1199/KMK.010/1991 tentang pasar modal, maka telah berdirilah PT. Bursa Efek Jakarta sebagai perwujudan Kepres dan Kepmenkeu tersebut. Pendirian PT. Bursa Efek Jakarta merupakan operasionalisasi pasar modal secara mandiri (swasta) sebagai tempat dan kegiatan yang bersangkutan dengan transaksi perdagangan sekuritas (efek).

Berdasarkan penjelasan di atas, serta melihat dari fungsi strategis dan perkembangan perbankan di Indonesia, maka penelitian ini mengambil judul "PENGUJIAN RASIO ALTMAN UNTUK MEMPREDIKSI KEBANGKRUTAN PERUSAHAAN PERBANKAN".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah rasio-rasio keuangan Altman bisa digunakan untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan perbankan di Bursa Efek Jakarta.
2. Apakah terdapat perbedaan rata-rata rasio keuangan perusahaan perbankan yang bangkrut/dilikuidasi dengan perusahaan perbankan yang tidak bangkrut.

C. Batasan Masalah

1. Alat analisis dalam penelitian ini menggunakan *Regression logistic*.
2. Perusahaan yang diteliti termasuk industri perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta.
 - a. Bagi perusahaan tidak bangkrut dalam penelitian ini adalah perusahaan yang masih beroperasi dan terdaftar di Bursa Efek Jakarta tahun 2002 sampai tahun 2004.
 - b. Bagi perusahaan yang bangkrut dalam penelitian ini adalah perusahaan yang telah di *delisted* tahun 2002 – 2004.
3. Rasio keuangan yang dipakai adalah rasio keuangan dari Altman yaitu $X_1 = \text{Working Capital} : \text{Total Aktiva}$, $X_2 = \text{Retained Earning} : \text{Total Asset}$, $X_3 = \text{Earning Before Income \& Tax} : \text{Total Asset}$, $X_4 = \text{Market Value of Equity} : \text{Book Value of Total Leverage}$, $X_5 = \text{Total Sales} : \text{Total Asset}$

D. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakan penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang ada yaitu:

1. Untuk menganalisis apakah rasio-rasio keuangan Altman dapat digunakan sebagai alat prediksi kebangkrutan perusahaan perbankan *go public* di Bursa Efek Jakarta.
2. Untuk menganalisis apakah terdapat perbedaan rata-rata rasio keuangan perusahaan perbankan yang bangkrut/dilikuidasi dengan perusahaan perbankan yang tidak bangkrut.

E. Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat yang dapat disampaikan sehubungan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menambah wawasan, ternyata rasio-rasio keuangan tidak hanya dapat digunakan untuk hal yang bersifat positif bagi perusahaan seperti memprediksi tingkat laba, tetapi juga dapat digunakan untuk memprediksi hal-hal terburuk yang dapat terjadi pada perusahaan termasuk terjadinya kebangkrutan.
2. Dapat memberikan gambaran pada perusahaan tentang kondisi yang dialami perusahaan sehingga perusahaan dapat mengantisipasi kemungkinan yang mungkin terjadi.
3. Dapat memberikan manfaat pada investor untuk segera menyikapi segala kemungkinan yang akan terjadi dalam kaitannya dengan kondisi kinerja keuangan perusahaan sebagai bahan pertimbangan investor dalam menanamkan dananya pada suatu perusahaan.